



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **49** TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGESAHAN *ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT*  
(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN : . . .



- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN), yang telah ditandatangani di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1988 tentang Pengesahan *an Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 15);

b. Keputusan . . .



- 3 -

- b. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40);
- c. Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments* (Protokol Perubahan terhadap Perjanjian antara Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 216); dan
- d. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 122),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 80



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 49 TAHUN 2012  
TANGGAL : 24 April 2012

JENJANG PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No	NAMA JABATAN	PANGKAT	GOL RUANG
1	Panitera	Pembina Utama	IV/e
		Pembina Utama Madya	IV/d
		Pembina Utama Muda	IV/c
2	Panitera Muda	Pembina Utama Muda	IV/c
		Pembina Tingkat I	IV/b
3	Panitera Pengganti Tingkat I	Pembina Tingkat I	IV/b
		Pembina	IV/a
4	Panitera Pengganti Tingkat II	Pembina	IV/a
		Penata Tingkat I	III/d
		Penata	III/c

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Agus Sumartono,S.H.,M.H.